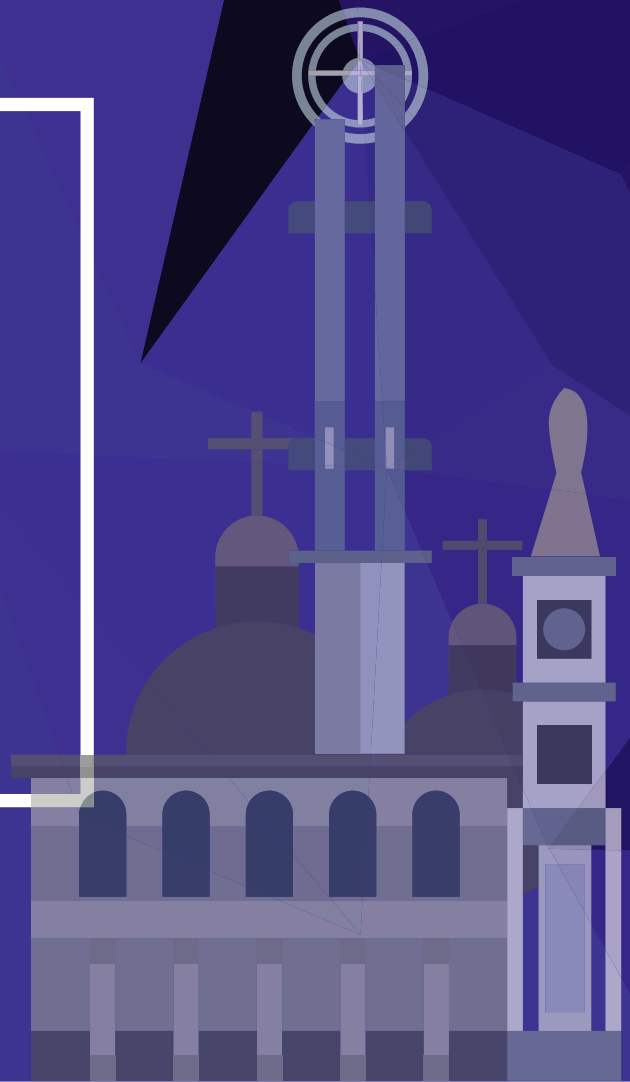




CEK FAKTA Google News Initiative

# POLICY BRIEF



## **Revitalisasi Kolaborasi Antarstakeholders Literasi Digital dalam Menciptakan Pemilu Damai 2024 di Kota Pontianak**

# Revitalisasi Kolaborasi Antarstakeholders Literasi Digital dalam Menciptakan Pemilu Damai 2024 di Kota Pontianak

Oleh:

Syarifah Ema Rahmaniah

syf.ema@fisip.untan.ac.id

**Abstrak:** *Policy brief tentang tantangan dan pencegahan hoaks menjelang pemilu di Kota Pontianak ini diperlukan sebagai alat untuk memetakan permasalahan hoaks yang mengancam ketenteraman dan martabat demokrasi. Policy brief ini sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu mengambil kebijakan terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memverifikasi hoaks politik. Perlu diketahui bahwa permasalahan hoaks politik di Kota Pontianak begitu kompleks, sehingga memerlukan aksi-aksi kolaborasi lintas organisasi seperti kepemudaan, etnis, agama, pegiat demokrasi, dan difabel. Selain itu, penyelenggara dan pengawas pemilu perlu mendorong dan memfasilitasi upaya kolaborasi ini, agar hoaks dapat teredukasi secara efektif dan efisien, sehingga chaos akibat hoaks dan provokasi pada Pemilu 2019 lalu tidak terulang lagi pada 2024 di Kota Pontianak.*

## Pendahuluan

Kabar bohong atau yang lebih populer dengan istilah hoaks merupakan informasi sesat yang membahayakan karena dapat mengaburkan bahkan menyesatkan persepsi manusia dalam menilai sesuatu dengan memalsukan sebuah informasi (Chen & Ishak, 2014). Hoaks sejatinya dapat tersebar melalui lisan maupun tulisan (Wahyu Nur Annisa, 2021). Menjelang pemilu, hoaks sering menjadi senjata mutakhir untuk mempropaganda masyarakat yang cenderung fanatik dalam mendukung calon legislatif dan eksekutif. Bahkan fanatisme politik ini hadir dalam ruang-ruang lingkup keagamaan, misalnya seringkali di media kita melihat figur-figur agama yang terafiliasi mengusung dan mendukung calon tertentu (Amanah Nurish, 2019).

Di Kalimantan Barat sendiri, hoaks dan politik pernah bersatu padu dalam nuansa konflik etnis, dalam 17 konflik etnis yang pernah direkap dari 1967 – 2008 setidaknya 14 konflik tersebut terjadi dalam momen politik dan diperkeruh oleh hoaks dan provokasi bernuansa SARA (Kristianus, 2011). Kejadian ini cukup berdampak kepada kestabilan di Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Belum lagi kejadian pascapemilu 2019 di Kota Pontianak yang meninggalkan banyak korban dan kerusakan akibat provokasi, hoaks, dan amukan massa. Setidaknya dalam kejadian ini, terdapat polisi yang mengalami penembakan, pembakaran kantor polisi, halte, dan blokade jalan.

Saat ini, kita sudah memasuki era digital yang mana potensi hoaks tidak hanya menyasar dari mulut ke mulut, melainkan secara massif di dunia digital. Setidaknya dalam akumulasi hoaks oleh Litbang Mafindo pada tahun 2022, hoaks politik menempati urutan tertinggi dengan jumlah 1.698 hoaks, dan ini belum terakumulasi dengan ledakan hoaks politik di tahun 2023 jelang pemilu. Potensi yang sama juga bisa mengancam Pontianak berkali lipat, apabila tidak ada upaya sistematis untuk mencegah dan menanggulangi hoaks politik. Upaya pencegahan dan penanggulangan ini dalam dunia informasi dikenal dengan istilah “*Prebunking*” dan “*Debunking*”. Teknik *prebunking* ini merupakan istilah untuk mengurai dan membelah disinformasi dengan menyediakan dan mengelola fakta pada opini masyarakat sedangkan *debunking* merupakan tindakan reaktif cepat dengan melakukan pengecekan fakta dan pengungkapan hasil cek fakta terhadap hoaks yang telah menyebar (Santoso dan Ubaidilla, 2022).

## Pendekatan dan Hasil

Berdasarkan hasil diskusi terfokus dan pemaparan dari berbagai pihak organisasi yang terlibat, maka permasalahan penanganan dan pencegahan hoaks di Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Tingginya penggunaan hoaks politik untuk menjatuhkan kubu tertentu dengan nuansa etnis atau agama;
2. Masih rendahnya keterampilan penyelenggara pemilu atau kelompok masyarakat etnis dan agama dalam melakukan pengecekan fakta dan pencegahan hoaks;
3. Tingginya potensi penyerangan terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu di momen politik;
4. Masih tingginya ancaman kepada jurnalis yang berusaha melakukan verifikasi fakta yang berkaitan dengan politik;
5. Rentannya kelompok marginal seperti difabel sebagai target dan penyebar karena minimnya sosialisasi dan pengetahuan mereka;
6. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dan akibat yang diakibatkan dari politisasi dan penyebaran hoaks jelang pemilu.

## Kesimpulan

Permasalahan dan tantangan hoaks politik menjelang pemilu di Kota Pontianak begitu kompleks, dari rentannya hoaks SARA, hoaks yang menyerang penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan peserta pemilu (baik sebagai korban maupun pelaku). Oleh sebab itu, penanganan ini juga harus melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti organisasi keagamaan, etnis, pemuda, pegiat demokrasi, dan organisasi difabel. KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan penyelenggara dan pengawas pemilu harus memberikan dukungan penuh kepada *stakeholder* ini, agar dapat mengawal demokrasi bebas fitnah dan bermartabat menjelang pemilu 2024 di Kota Pontianak.

## Rekomendasi

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan terkait hoaks politik menjelang pemilu, maka para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses *Forum Group Discussion* “Mengawal Demokrasi Bebas Fitnah dan Hoaks Menuju Pemilu 2024” merekomendasikan hal-hal berikut ini untuk mewujudkan Pontianak bebas hoaks menjelang pemilu 2024:

1. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memberikan platform yang dapat memperkuat penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, organisasi etnis, agama, dan pegiat demokrasi yang ada di Kalimantan Barat untuk memiliki keterampilan pengecekan fakta dan pencegahan hoaks menjelang pemilu.
2. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memberikan

- respon aktif terkait hoaks politik dan kepemiluan.
3. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak dihimbau bersama organisasi pengecekan fakta (Mafindo) memberikan edukasi kepada peserta pemilu terkait pentingnya untuk tidak menyebarkan dan menggunakan hoaks dalam kampanye dan strategi kemenangan pemilu.
  4. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memfasilitasi kolaborasi antarorganisasi membuat konten bernuansa lokal tentang lawan hoaks dan pemilu damai.
  5. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memberikan fasilitas untuk lintas organisasi etnis, agama, pemuda, dan pegiat demokrasi mengedukasi masyarakat dan pemilih pemula terkait pemahaman hoaks jelang pemilu.
  6. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memberikan perhatian kepada jurnalis yang sering mendapatkan penyerangan digital ketika hendak mengkonter hoaks pemilu dengan pelatihan dan akses keamanan digital.
  7. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak bersama organisasi Cek Fakta (Mafindo) mengedukasi pemilih pemula dan mahasiswa bagaimana melakukan pengecekan fakta dan pencegahan hoaks politik jelang pemilu.
  8. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memberikan sanksi tegas kepada peserta pemilu yang terbukti melakukan politisasi hoaks jelang pemilu.
  9. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memfasilitasi pemangku kepentingan untuk mengedukasi larangan dalam pemilu dan konsekuensi penyebaran hoaks pemilu kepada masyarakat.
  10. Organisasi Keagamaan dan Etnis menghimbau umat dan bagian etnisnya untuk tidak terprovokasi hoaks politik menjelang pemilu dan tidak menyebarkan pesan provokatif yang belum jelas kebenarannya.
  11. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memberikan sarana edukasi kepada kelompok difabel agar tidak mudah menjadi target atau penyebar hoaks.

## Referensi/Rujukan

- Annisa, Wahyu Nur, et al. "Peran Literasi Digital untuk Mencegah Penyebaran Hoaks bagi Masyarakat Indonesia." *Journal of Education and Technology* 1.2 (2021): 113-118.
- Chen, Y.Y., Yong, S.-P., & Ishak, A. "Email Hoax Detection System Using Levenshtein Distance Method." *Journal of Computers*, Vol. 2, No. 2, academy publisher (2014).
- Kristianus. " Nasionalisme Etnik di Kalimantan Barat." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* (2011): 165.
- Nurish, Amanah. "EKSTREMISME, DARIFANATISME KE, KECEMASAN ILUSI, and DAN TINDAKAN KEKERASAN." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 21.1 (2019).
- Santoso, Widjajanti M., et al. "Disinformation and Tradition as Prebunking:: The Case of Javanese Culture." *Proceedings of Indonesia Focus* 1.1 (2022): 5.



**CEK FAKTA** Google News Initiative



CekFakta.com



@cekfaktacom



cekfaktacom



cekfakta.com